



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : KEMANTREN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTARIKSA AGUS PURNAMA**
2. Jabatan : **MANTRI PAMONG PRAJA**
3. NHK : **95100**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **113.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **70.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **61.804.253**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.494.804.253**

III. HUTANG Rp. **220.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.274.804.253**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.